# NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

# PENGARUHDANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)



**Oleh:**

***Akma Monika Delta Elvana***

***16061127***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**SURATPERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Akmamonika Delta Elvana

NIM : 16061127

Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akuntansi

Jenis : Skripsi

Judul : PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Karya tulis berupa skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelaar akademik baik di Universitas Mercu Buana Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMBY atas penulisan karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademiskepada perpustakaan UMBY, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
4. Bersedia menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMBY, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, juli 2020

Yang menyatakan

Akmamonika Delta Elvana

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

***THE EFFECT OF GENERAL ALLOCATION FUNDS AND REGIONAL ORIGINAL INCOME OF REGIONAL / CITY SHOPPING IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA***

**Akmamonika Delta Elvana**

**Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

[**akmadelta@gmail.com**](mailto:akmadelta@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Derah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, periode tahun 2013-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan sampel menggunakan purpose sampling dan sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 5 kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang mana data diperoleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh melalui situs Badan Pusat Statistik. Analisis pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah begitupun dengan Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2013-2018.

**Kata Kunci: PAD, DAU, Belanja Daerah**

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the effect of Regional Original Revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) on Regional Expenditures in district / city governments in Yogyakarta Special Region Province, the period 2013-2018. The method used in this research is quantitative method. The population used is the district / city in the Special Province of Yogyakarta. Sampling using purpose sampling and samples in this study are as many as 5 districts / cities. The data used in this study are secondary data where data obtained from the Regional Budget Revenue and Expenditure reports obtained through the Central Statistics Agency website. The analysis in this research is using descriptive analysis, classic assumption test and multiple linear regression. The results of this study indicate that the Regional Original Revenue (PAD) influences Regional Expenditures as well as the General Allocation Fund (DAU) also influences Regional Expenditures in district / city governments in the Special Region of Yogyakarta in 2013-2018.*

***Keywords: PAD, DAU,* Belanja Daerah**

**PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menggunakan model sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada suatu daerah untuk mengatur urusan pemerintah di daerahnya sendiri. Wewenang daerah yang diterima dari pemerintah pusat itu disebut otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai secara efektif tangal 1 Januari 2001. Untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

Otonomi daerah memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan dana yang cukup besar sebagai modal awal menuju kemandirian pemerintah daerah. Sumber dana utama pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di pakai untuk membiayai belanja modal dan pembangunanya. Namun dalam beberapa tahun berjalan sumber pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja. Pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Tujuan dari transfer itu adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan fiskal atas pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh provinsi.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, tetapi dana DAK justru belum meluas ke daerah-daerah tertinggal, terluar, terpencil serta yang kapasitas pemerintahannya belum memadai dalam memberikan fungsi pelayanan public, (Isti Peramatasari, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Mentayani et al (2012) pendapatan asli daerah idealnya merupakan sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lainnya cenderung bersfiat fluktuatif dan di luar pengendalian kewenangan daerah. Selain pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendapatan lain berupa dan perimbangan. Pendapatan asli daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan program pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja-belanja daerah tersebut dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan atau disebut juga dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sudah banyak di lakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Suryani (2018), Della dan Alpon Satrianto (2019), Putri dan Haryanto (2019) menunjukan dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Sedangkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Ichsan, Khairur (2018) menunjukan hasil yang berbeda dimana pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, Maharini (2018) menunjukan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan Rusmita (2018) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

**RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

**LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

***Stewardship Theory***

*Stewardship Theory* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Davis, 1991 dalam Budiarti, E., 2017). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Etty Murwaningsih (2009) dalam Budiarti, E. (2017) teori *Stewardship* berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan manusia merupakan individu yang berintegrasi. Pemerintah selaku *stewardship* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah *(stewardship)* dan rakyat *(principal)* berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public*). Sehingga dapat diterapkan dalam model khusus organisasi sektor publik dengan teori *stewardship*.

**Desentralisasi**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bagian Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama berkaitan dengan aspek fiskal, politik, adminitrasi dan sistem pemerintahan serta pembangunan secara sosial dan ekonomi.

**Otonomi Daerah**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 22 tahun 1999). Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan azas dari desentralisasi yang berarti bahwa penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 22 tahun 1999).

**APBD**

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten kota. Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

**Struktur APBD**

Struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Standar akuntansi kepemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

**Sumber-Sumber Pendapatan Daerah**

Pemerintah sebagai birokrasi yang memiliki tugas melaksanakan, mengawasi dan definisi operasional penerimaan daerah mengacu pada Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah.

**Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU No.23 tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang di peroleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Hastuti (2011) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk setiap daerah berbeda-beda

**Dana Perimbangan**

Pengertian Dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 Pasal 1 Ayat 18 tentang Perimbangan antar Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Departemen Keuangan, 2004).

**Dana Alokasi Khusus**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan, untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, seperti dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

**Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk propinsi dan kabupaten/kota”. Surakhman, A. (2019), dana alokasi umum mempunyai fungsi sebagai faktor pemerataan fiskal. Faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya dana alokasi umum untuk setiap daerah adalah celah fiskal (*fiscal gap*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

**Belanja Daerah**

Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah membagi belanja daerah menjadi dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja daerah yang penganggarannya secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, dan Belanja modal. Belanja langsung ini merupakan belanja yang dianggarkan oleh pemerintah daerah setiap bulandalam satu tahun anggaran kepada pegawai yang bersifat tetap dan untuk belanja daerah lainnya yang bersifat periodik.

**Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dari dana perimbangan yang diberikan pemerintah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan (Liando dan Hermanto, 2017). Hasil penelitian Della, Jesica. Alpon Satrianto (2019) memperoleh bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Peningkatan Dana Aloaksi Umum akan mampu meningktakan Belanja Daerah, semakin besar Dana Alokasi Umum maka belanja daerah akan semakin besar pula, dengan adanya peningkatan Dana Alokasi Umum ini akan mendukung peningkatan peyalanan publik yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

H1: DAU memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah**

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Sumber Pendapatan Asli Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah mengacu pada pendapatan daerah berasal dari sumber yang dimiliki oleh dan terletak di wilayah tersebut dikumpulkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Menurut beberapa penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini digunakan suatu daerah untuk memenuhi belanja kebutuhan daerahnya. Dengan semakin banyaknya PAD maka tingkat kemandirian suatu daerah akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat rendah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Liandodan Hermanto (2017) yang membuktikan bahwa PAD mempengaruhi Belanja Daerah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bawa Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah terutama untuk pembangunan. Oleh karena itu semakin tinggi sumber PAD maka akan semakin besar anggaran belanja yang dikeluarkan

H2: PAD memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah

**KERANGKA PEMIKIRAN**

Berdasarkan landasan teori dan pengembangan hipotesis, yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2013-2018. Model penelitian yang diajukan dalam gambar berikut ini merupakan kerangka konseptual dan sebagai alur pemikiran dalam menguji hipotesis:

Penerimaan Daerah (DAU tahun 2013-2018)

Variabel X1

h1+

Pengeluaran Daerah (BD tahun 2013-2018)

Penerimaan Daerah (PAD tahun 2013-2018)

Variabel X2

**METODE PENELITIAN**

**Populasi dan sampel**

Menurut Sugiyono (2012) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Menurut Sugiyono (2012) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini di lakukan pada 6 tahun terakhir yaitu tahun 2013-2018. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan (Nuryadi, N dkk, 2017). Sedangkan, dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu pemerintahan kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi D.I Yogyakarta memiliki informasi keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai variabel penelitian dengan teknik pengambilan sampling jenuh dimana semua anggota populasi di gunakan sebagai sampel. Informasi keuangan yang di butuhkan antara lain belanja daerah, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dari tahun 2013 – 2018.

**Statistik Deskriptif**

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum atau deskripsi dari variabel yang diteliti. Dalam tabel statistik deskriptif ditunjukkan angka minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Jumlah rata-rata digunakan untuk menentukan fluktuasi satuan variabel yang diuji. Data maksimum dan minimum memperlihatkan kisaran data yang normal untuk menghindari biasnya hasil penelitian. Selengkapnya disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descriptive Statistics | | | | | |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| Dana Alokasi Umum | 30 | 594978790 | 1014310630 | 827485879.60 | 149396656.807 |
| Pendapatan Asli Daerah | 30 | 717151176 | 2615515097 | 1575737436.20 | 433452296.600 |
| Belanja Daerah | 30 | 935369836 | 2770682731 | 1683248211.10 | 458174342.271 |
| Valid N (listwise) | 30 |  |  |  |  |

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh:

* 1. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum 594.978.790, nilai maximum 1.014.310.630 dengan rata-rata sebesar 827.485.879,60 dengan standar deviasi 149.396.656,807
  2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum 717.151.176, nilai maximum 2.615.515.097, dengan rata-rata sebesar 1.575.737.436,20 dengan standar deviasi 433.452.296,600
  3. Belanja Daerah (BD) memiliki nilai minimum 935.369.836, nilai maximum 2.770.682.731, dengan rata-rata sebesar 1.683.248.211,10 dengan standar deviasi 458.174.342,271

**Uji Normalitas**

Uji normalitas yang dimaksud untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 4.2

Hasil Uji Normalitas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|  | | Unstandardized Residual |
| N | | 30 |
| Normal Parametersa,b | Mean | .0000002 |
| Std. Deviation | 255756352.29579675 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .151 |
| Positive | .151 |
| Negative | -.078 |
| Test Statistic | | .151 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .079c |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated from data. | | |
| c. Lilliefors Significance Correction. | | |

*Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2020*

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,151 dengan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,079. *Asymp. Sig. (2-tailed)* memiliki nilai sebesar 0,079 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) maka dapat disimpulkan bahwa data residual memiliki distribusi normal. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kolerasi antara variabel independen dalam sebuah model regresi berganda. Metode uji multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan metode *Variance Inflation Factors* (VIF) dan nilai Tolerance. Pengujian ini dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10. Berikut tabel hasil uji multikolinieritas:

Tabel 4.3

Hasil Uji Multikolinieritas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Collinearity Statistics | |
| B | Std. Error | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | -437803365.381 | 280579104.929 |  |  |
| Dana Alokasi Umum | 2.030 | .384 | .736 | 1.358 |
| Pendapatan Asli Daerah | .280 | .132 | .736 | 1.358 |

*Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2020*

Berdasarkan table 4.3 Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai *tolerance* 0,736 dan VIF sebesar 1,358 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai *tolerance 0,736* dan VIF sebesar 1,358. jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas. Pada penelitian ini semua variabel memenuhi syarat nilai *tolerance* dan VIF, sehingga seluruh variabel independen tidak memiliki korelasi.

* + 1. **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelaso antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya. Penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunkan uji Durbin Watson. Hasil uji autokorelasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil Uji Autokorelasi

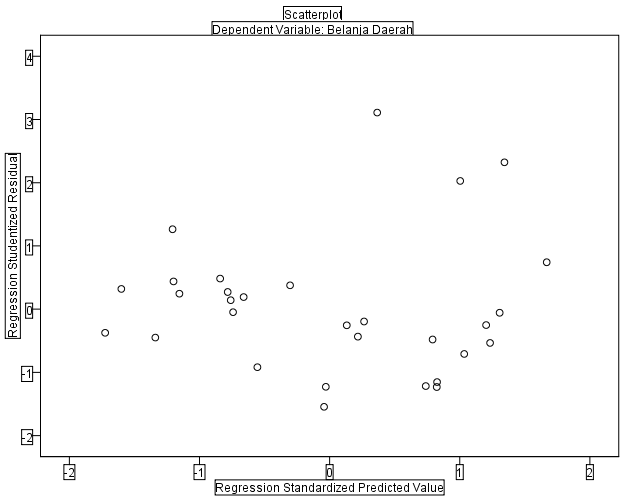
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model Summaryb | | | | | |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .830a | .688 | .665 | 265059604.789 | 2.050 |
| a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum | | | | | |
| b. Dependent Variable: Belanja Daerah | | | | | |

*Sumber: Hasil Olah Data SPSS,2020*

Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji autokorelasi dengan nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 2,050. Selanjutnya nilai DW akan dibandingkan dengan tabel DW signifikansi 0,05. Jumlah sampel sebanyak 30 dan variabel independen sebanyak 2, maka diperoleh hasil analisa DW

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID. Jika tidak ada pola yang jelas atau tidak teratur, dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013 dalam Agusta, 2017). Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.1  
Hasil Uji heteroskedastisitas

*Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2020*

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot yang ditunjukkan pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali dan penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi msalah heteroskedastisitas.

* + - 1. **Regresi Linear Berganda**

Analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression*) digunakan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD). Rangkuman hasil perhitungan regresi berganda dengan program SPSS disajikan pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficientsa | | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | -437803365.381 | 280579104.929 |  | -1.560 | .130 |
| Dana Alokasi Umum | 2.030 | .384 | .662 | 5.288 | .000 |
| Pendapatan Asli Daerah | .280 | .132 | .265 | 2.115 | .044 |
| a. Dependent Variable: Belanja Daerah | | | | | | |

*Sumber: Hasil Olah Data SPSS,2020*

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Y= -437803365.381+2,030X1+0,280X2+e

**Uji t**

Uji t pada dasarnya menunjukkan pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil uji t-test dapat ditunjukkan pada Tabel 4.7 diatas. Uji hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel dana alokasi umum dan pendapatan daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 dapat diinterprestasikan sebagai berikut:

**Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah.**

Pada pengujian ini diperoleh nilai signifikan t pada variabel dana alokasi umum sebesar 0,00. Dikarenakan nilai signifikan lebih kecil dari signifikan 0,05 atau (0,00 < 0,05) yang berati dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan signifikan t < signifikan 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan diduga dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah, diterima (H1 diterima).

**Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.**

Pada pengujian ini diperoleh nilai signifikan t pada variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,044. Dikarenakan nilai signifikan t lebih kecil dari signifikan 0,05 atau (0,044 < 0,05) yang berati pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketentuan nilai signifikan t < signifikan 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan diduga pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, di terima (H1 diterima).

**PEMBAHASAN**

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian di atas, di peroleh hasil bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil ini di dukung dengan hasil penelitian Suryani, Ade Irma. (2018) dan Ichsan, Khairur (2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini karena adanya dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menyebabkan pemerintah daerah lebih leluasa menggunakan dana untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat atau keperluan pembelanjaan dan pembiayaan lainnya. Dalam meningkatan fasilitas pelayanan publik dan belanja daerah pengeluaran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 50% masih menggunakan dana alokasi umum. (Badan Pusat Statistik Yogyakarta)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian di atas, di peroleh hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil ini di dukung dengan hasil penelitian Della (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah. PAD merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja daerah. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan lain sebagainya. Pertumbuhan belanja daerah merupakan salah satu usaha pemerintahan kabupaten/kota untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing. Pertumbuhan belanja daerah merupakan ciri positif bahwa pemerintahan Kabupaten/Kota telah berusaha mengurangi ketergantungan terhadap pemerintahan pusat, peningkatan fasilitas umum, pemberdayaan usaha milik daerah, meningkatkan produktivitas sektor industri, mempermudah akses perdagangan untuk masyarakat, pengoptimalan pajak daerah, menggali potensi wisata milik daerah dan pembangunan infrastruktur di harapkan dapan meningkatkan pendapatan asli daerah.

**KESIMPULAN**

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna untuk kepentingan praktis dan penelitian selanjutnya yaitu:

-Bagi pemerintah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana pembiayaan Belanja Daerah lebih bergantung pada penerimaaan dana-dana transfer (khususnya DAU), maka untuk mengurangi ketergantungan tersebut pemerintah daerah disarankan melakukan upaya memaksimalkan potensi daerah nya yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah.

-Untuk penelitian selanjutnya, penelitian secara time series perlu dilakukan dalam menganalisis pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah serta terhadap belanja sektor industri, pariwisata dan perdagangan secara lebih luas.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abimanyu. (2005). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY*. JAAI, Vol. 08, No. 2, pp.416-424

Putra, Adi. 2014. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Karangasem. Jurnal Ilmiah akuntansi dan humanika*. Universitas Pendidikan Ganesha

Aswani & Zeni. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa*. Jurnal Education and Economic (JEE) ISNN: 2654-9808 E-ISNN:2615-448x, 01(04), Oktober-Desember 2018. 438-449

Ayu, Diah, Kusumadewi dan Rahman, Arief, 2007, *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia*. JAAI, Vol. 11, No. 1, Juni

Andri, Tolu dkk. 2013. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kota Pada Bitung)*. Jurnal Berkala Ilmiah. Universitas Sam Ratulangi

Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Cahyani, Melia Gita (2018). Analisis Fenomena Flypaper Effect pada Provinsi Khusus Di Indonesia Tahun 2005-2013. Skripsi Thesis, Niversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Della, Jesica., Alpon Satrianto (2019). *Analisis Flypaper Effect dan Kemampuan Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Sumatera Barat*

Firdayanti, Febriana Dan Muhammad Taufiq hidayat (2019). *Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah pemerintah kota Surabaya*. Jurnal Ekonomi Akuntansi, Hal 49-66 Volume 4. Nomor 1

Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi VIII. BadanPenerbit–UNDIP, Semarang

Halim, Abdul, 2002. *Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat

Hosana, Leica Jastien (2018). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SURPLUS ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat).* Skripsi(S1) thesis, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung

Mentayani, Ida., Nurul Hayati dan Rusmanto (2012). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kota Dan Kabupaten Di Propinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Spread

Ishak. Ks, Rudy Arafah, Hasnah M (2019). *Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (Dau)Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad)Terhadap Belanja Daerah Di Kota Parepare.* Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Volume 2, Nomor 2, Agustus2019

Ichsan, Khairur (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Danfiscal Stress terhadap Belanja Daerah.* Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas lampung Bandar Lampung

Kuncoro, Haryo. 2004. *Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 9

Landiyanto, Erlangga Agustino, 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*. Cures Working Paper, No. 05/01

Liando, I. dan S.B. Hermanto. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah padaKabupaten / Kota Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol. 6, No. 22, h. 1–22

Listiorini. 2012. *Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Jurnal Keuangan dan Bisnis

Lukman, Mohammad. (2015). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Flypaper Effect Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Jepara Tahun 2001-2013)*. Skripsi Sarjana Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

Mahsun, Moh., Sulistiyowati, Firma dan Purwanugraha, Heribertus Andre. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE

Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang

Mardiasmo,2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mujahidin (2020). *Desentralisasi kewenangan bidang adminitrasi kependudukan dan pencatatan sipil.* Jatiswara vol 3 no 1

Niskanen, William. (1991), *A Reflection on Bureaucracy and Representative Government, in Andre Blais and Stephane Dion, eds, The Budget Maximising Bureaucrat*: Appraisals and Evidence, University of Pittsburgh, Pittsburgh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Permatasari, Isti dan Titik Mildawati. (2016). *Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur*. ISSN: 2460-0585. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi

Pramuka, B. Adan D.W Al-Firsta. 2010. *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Di Karesidenan Banyumas. Skripsi.* Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto

Putri, Aliferiana Irsyadhea dan Haryanto. (2019). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum Danpendapatan Asli Daerah Terhadap belanja Daerah kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah*. Diponegoro Journal of accounting, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, Halaman1-15

Ramadhan, Prima Nur. (2018). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah.* Skripsi Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Rusmita, Sari (2016) *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan KewirausahaanVol. 5, No. 3, 237 –257